

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN ROTE NDAO BERDASARKAN HASIL AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Adriana Iopo^{1*}, Eleksi Yosefina Budiyan Poyk², Barnabas Jermias Jacob Salmoen Pella³, Putri Narwastu Boyk⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Keuangan dan Perbankan, AKUB Effata Kupang

Jl. Sumba No.17 Fatubesi, Kupang – Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Email: ¹adrianalopo20@gmail.com, ²eleksipoyk27@akub-effata.com, ³barenpella23@gmail.com,

⁴putriboyk23@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan periode 2021–2023. Pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK serta penghitungan Indeks SAP sebagai ukuran kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku. Analisis mencakup opini audit BPK, kesesuaian tujuh komponen laporan keuangan dengan SAP, serta faktor-faktor yang memengaruhi temuan BPK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP pada LKPD Kabupaten Rote Ndao sudah baik, terbukti dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut dan Indeks SAP sebesar 100%. Meski demikian, terdapat temuan minor terkait pengelolaan aset tetap, pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengendalian internal, dan kepatuhan regulasi yang bersifat teknis-administratif dan tidak memengaruhi kewajaran laporan secara material. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan pencatatan aset, pengelolaan PAD, dan penguatan pengendalian internal guna menjaga akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan di masa mendatang.

Kata kunci: Laporan Keuangan, Opini Audit, Penerapan dan Indeks SAP

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Government Accounting Standards (SAP) in the Local Government Financial Statements (LKPD) of Rote Ndao Regency based on the audit results of the Supreme Audit Agency (BPK) for the 2021–2023 period. The research approach utilizes both quantitative and qualitative descriptive methods, using secondary data obtained from BPK's Audit Result Reports (LHP) and the calculation of the SAP Index as a measure of the financial statements' compliance with the applicable standards. The analysis encompasses BPK's audit opinions, the conformity of the seven financial statement components with SAP, and the factors influencing BPK's findings.

The results indicate that the implementation of SAP in the LKPD of Rote Ndao Regency has been well executed, as evidenced by the achievement of an Unqualified Opinion (WTP) for three consecutive years and an SAP Index of 100%. Nevertheless, there are minor findings related to fixed asset management, the optimization of Local Own-Source Revenue (PAD), internal controls, and regulatory compliance, which are technical-administrative in nature and do not materially affect the fairness of the statements. Based on these findings, it is recommended that the local government improve asset recording, PAD management, and strengthen internal controls to maintain accountability and the quality of financial statements in the future.

Keywords: Financial Statements, Audit Opinion, SAP Implementation and Index

1. PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan instrumen krusial dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Berdasarkan amanat undang-undang, setiap pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) [1]. Penerapan SAP berbasis akrual diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus



kas pemerintah daerah. Kabupaten Rote Ndao, sebagai salah satu wilayah beranda selatan Indonesia di Provinsi

Nusa Tenggara Timur, terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangannya melalui implementasi SAP yang konsisten.

Namun, dalam praktiknya, penyusunan laporan keuangan sering kali menghadapi tantangan teknis, mulai dari kapasitas sumber daya manusia hingga integrasi sistem informasi akuntansi [2]. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi NTT melakukan audit tahunan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Catatan dan temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menjadi indikator objektif sejauh mana SAP telah diimplementasikan dengan benar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan SAP pada Laporan Keuangan Kabupaten Rote Ndao serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat berdasarkan hasil audit BPK. Kontribusi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk memperbaiki kelemahan sistem pencatatan dan mempertahankan opini audit yang optimal di masa mendatang.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran mendalam mengenai penerapan akuntansi pemerintahan di Kabupaten Rote Ndao. Fokus penelitian adalah kesesuaian laporan keuangan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Data utama yang dianalisis adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rote Ndao periode terbaru.

Prosedur Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menelaah dokumen resmi LHP BPK, catatan atas laporan keuangan (CaLK), serta regulasi daerah terkait. Selain itu, dilakukan studi literatur terhadap teori-teori akuntansi sektor publik dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Tahapan analisis data mengikuti model interaktif yang meliputi reduksi data hasil audit, penyajian data ke dalam tabel komparatif, dan penarikan kesimpulan terkait kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Hasil Audit BPK dan Kesesuaian SAP

Berdasarkan hasil analisis terhadap LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menerapkan SAP akrual. Komponen laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan CaLK secara umum telah disajikan sesuai format standar.

Analisis Kepatuhan Kriteria

Analisis kepatuhan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rote Ndao berfokus pada kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan regulasi yang berlaku, khususnya PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrual. Melalui kacamata Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tingkat kepatuhan ini diuji secara materiel melalui tujuh komponen laporan keuangan utama, mulai dari Laporan Realisasi Anggaran hingga Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Fokus utama analisis tertuju pada bagaimana Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menerapkan prinsip pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atas pos-pos krusial seperti pendapatan, beban, kewajiban, dan terutama penatausahaan aset tetap yang sering kali menjadi titik kritis dalam audit pemerintahan.

Dalam implementasinya, temuan-temuan BPK dalam LHP menjadi indikator objektif untuk mengukur sejauh mana kepatuhan tersebut telah dicapai atau justru masih menyisakan celah penyimpangan standar. Ketika BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) atau ketidaksesuaian pengakuan akun berbasis akrual, hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap SAP belum sepenuhnya optimal dilakukan oleh Pemkab Rote Ndao. Ketidakpatuhan ini, baik yang bersifat administratif maupun substantif, secara langsung tecermin dari kualitas opini audit yang diberikan oleh BPK. Seperti data terlampir dalam tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 1. Analisis Kepatuhan LKPD Kabupaten Rote Ndao terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Tahun 2021-2023

NO	Komponen SAP yang dianalisis	Kriteria Kepatuhan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Keterangan /Temuan BPK
1	Penyajian Laporan	Seluruh komponen (LRA,	Ya	Ya	Ya	Semua komponen disajikan dan ditandatangani Kepala Daerah

	Kuangan Lengkap	Neraca, LO, LPSAL, LAK, CaLK) disajikan lengkap				
2	Basis Akuntansi	Menggunakan basis akrual sesuai SAP terbaru	Ya	Ya	Ya	Sudah berbasis akrual, sesuai SAP
3	Klasifikasi Akun Sesuai SAP	Pengelompokan akun sesuai PSAP dan lampiran SAP	Ya	Ya	Ya	Tidak ada salah klasifikasi material
4	Pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan	CaLK disusun lengkap, informatif, dan sesuai ketentuan SAP	Ya	Ya	Ya	Pengungkapan dinilai memadai oleh BPK
5	Konsistensi Penyajian	Konsisten antar tahun dan antar komponen laporan	Ya	Ya	Ya	Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan, penyajian konsisten antar tahun
6	Pengakuan, Pengukuran, dan Penilaian Aset	Sesuai SAP, tidak ada temuan material	Ya	Ya	Ya	Tidak ditemukan temuan material terkait pengakuan, pengukuran, dan penilaian aset
7	Pengakuan, Pengukuran, dan Penilaian Kewajiban	Sesuai SAP, tidak ada temuan material	Ya	Ya	Ya	Tidak ditemukan temuan material terkait pengakuan, pengukuran, dan penilaian kewajiban
8	Pengungkapan Transaksi Non-Kas	Transaksi non-kas diungkapkan secara memadai dalam CaLK	Ya	Ya	Ya	Transaksi non-kas telah diungkapkan secara memadai dalam CaLK
9	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	Tidak ada pelanggaran signifikan yang dicatat BPK	Ya	Ya	Ya	Tidak ditemukan ketidakpatuhan material terhadap peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan
10	Rekomendasi BPK atas Ketidakpatuhan	Tindak lanjut rekomendasi BPK atas temuan tahun sebelumnya	Ya	Ya	Ya	Rekomendasi BPK tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti, tidak ada temuan signifikan yang belum ditindaklanjuti dan mempengaruhi opini BPK

Sumber: Olahan penulis berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan NTT, 2021–2023

Keterangan:

1. "Ya" berarti memenuhi kriteria SAP pada tahun tersebut.
2. "Sudah" berarti rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti.

Faktor-yang mempengaruhi ketidaksesuaian yang ditemukan BPK dalam laporan keuangan

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan NTT tahun 2021–2023, terdapat beberapa area temuan yang berulang dari tahun ke tahun. Temuan tersebut dapat dikategorikan menjadi empat faktor utama, yaitu pengelolaan aset tetap, pengelolaan PAD, kelemahan pengendalian internal, dan kepatuhan regulasi.

Tabel 2. Temuan BPK

No	Area Temuan	2021	2022	2023
1	Pengelolaan Aset Tetap	Aset belum sepenuhnya didukung bukti kepemilikan sah	Aset belum didukung bukti kepemilikan sah, pencatatan belum tertib	Aset belum didukung bukti kepemilikan sah, penatausahaan belum tertib

2	Pendapatan Asli Daerah	Pemungutan pajak & retribusi belum optimal	Pengelolaan pajak & retribusi belum optimal	Pemungutan pajak & retribusi belum optimal, potensi belum tergali penuh
3	Pengendalian Internal	Sistem pengendalian intern belum efektif, ada keterlambatan laporan	SPI masih lemah, keterlambatan laporan & kelemahan prosedur OPD	SPI belum efektif, keterlambatan laporan & kelemahan prosedur OPD
4	Kepatuhan Regulasi	Pertanggungjawaban belanja barang/jasa belum lengkap	Pertanggungjawaban belanja daerah belum lengkap	Pertanggungjawaban belanja barang/jasa belum lengkap

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun terakhir, tetapi hasil audit BPK menunjukkan adanya beberapa faktor struktural yang berpotensi menurunkan kualitas laporan. Faktor-faktor ini bersifat teknis-administratif dan mencakup pengelolaan aset tetap, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap regulasi. Keempat faktor tersebut memiliki akar masalah yang berbeda, mulai dari pencatatan aset yang belum tertib, basis data wajib pajak yang lemah, terbatasnya kualitas SDM, dan lemahnya pengawasan internal dalam belanja barang/jasa. Dampak dari masalah ini bervariasi, mulai dari menurunnya keandalan Neraca dan LRA hingga menurunnya kualitas pelaporan.

Analisis Temuan Utama BPK

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan NTT atas LKPD Kabupaten Rote Ndao tahun 2021–2023, terdapat beberapa temuan utama terkait penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Analisis temuan ini bersifat deskriptif dan mengacu pada dampak temuan terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan SAP.

Tabel 3. Temuan Utama BPK Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021-2023

No	Tahun	Area Temuan / Komponen SAP	Temuan / Akar Masalah	Dampak
1	2021	Aset Tetap	Pencatatan aset belum tertib; beberapa aset belum memiliki bukti kepemilikan sah	Menurunkan keandalan Neraca & CaLK
2	2021	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Basis data wajib pajak belum lengkap; sistem pemungutan kurang modern	LRA belum sepenuhnya andal
3	2021	Belanja & Kewajiban	Koordinasi antar-OPD & prosedur akuntansi lemah	Menurunkan efektivitas pelaporan
4	2022	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	Beberapa akun belum lengkap	Pengungkapan belum sepenuhnya memadai
5	2022	Pengendalian Internal (SPI)	Kelemahan monitoring & kapasitas SDM terbatas	Efektivitas pelaporan menurun
6	2023	Kepatuhan terhadap Regulasi	Pengawasan internal belanja barang/jasa masih lemah	Kepatuhan regulasi menurun, belum memengaruhi kewajaran laporan

Sumber: Olahan penulis berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan NTT, 2021–2023

Dari Tabel 3. terlihat bahwa temuan minor terkait aset, PAD, SPI, CaLK, dan kepatuhan regulasi tidak memengaruhi opini WTP. Namun, tindak lanjut rekomendasi BPK dan perbaikan internal tetap diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di masa mendatang.

Analisis temuan utama BPK menunjukkan kekurangan dokumentasi bukti kepemilikan aset, kesalahan pengakuan pendapatan dan belanja minor, serta perlunya perbaikan sistem internal untuk mendukung akurasi laporan keuangan. Perbandingan antar tahun menunjukkan tren positif, di mana indeks SAP tetap 100% selama tiga tahun, opini WTP konsisten, dan jumlah temuan minor BPK mengalami penurunan. Hal ini mencerminkan komitmen Kabupaten Rote Ndao dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan penerapan SAP, meskipun perbaikan minor tetap diperlukan pada beberapa aspek administrasi dan prosedur internal. Tren positif yang terpantau melalui stabilitas indeks SAP dan opini WTP selama tiga tahun, serta jumlah temuan minor yang menurun dari tahun ke tahun, menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan secara berkelanjutan. Namun demikian, perbaikan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem internal harus terus didorong agar implementasi SAP semakin optimal sesuai dengan perkembangan standar dan tuntutan tata kelola keuangan negara yang baik.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021–2023, dapat disimpulkan bahwa penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang dibuktikan dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tiga tahun berturut-turut serta tingkat kesesuaian SAP sebesar 100% pada seluruh komponen laporan keuangan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa temuan minor yang berulang, seperti pengelolaan aset tetap yang belum sepenuhnya tertib, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum maksimal, kelemahan dalam pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap regulasi yang masih perlu ditingkatkan. Temuan-temuan tersebut tidak memengaruhi kewajaran laporan keuangan secara material, namun menunjukkan pentingnya perbaikan dan penguatan tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Rote Ndao.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum Ardianningsih, 2019. *Audit Laporan Keuangan*, Jakarta
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021*. Kupang: BPK Perwakilan NTT.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022*. Kupang: BPK Perwakilan NTT.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023*. Kupang: BPK Perwakilan NTT.
- Buku pedoman penulisan TA Akademi Keuangan dan Perbankan Effata Kupang tahun 2024
- Buku Standar Akuntansi Pemerintah 2025 Komite SAP
- DAERAH, P. 2025. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Teori dan Praktik)*. Jakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2020. *Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual* (Revisi 2020). Jakarta: KSAP. (Lihat Kerangka Konseptual SAP, hlm. 17–30).
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). 2021. *Buku Standar Akuntansi Pemerintahan 2021*. Jakarta: KSAP.
- Mahmudi, M. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mursyidi (2009). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*.
- Pardede, L. P. N. 2024. Analisis Rasio Efektivitas Pad, Dan Rasio Efisiensi Pad Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Kabupaten Kendal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 467-473.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Siswanto, S., & Maylani, F. 2022. *Akuntansi Pemerintahan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yalabi, D. A. 2021. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Pitis AKP*, 5(2), 123–129.